

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Efendi J, Ibrahim J (2016) Metode dan penelitian hukum: normatif dan empiris, prenadamedia group
- Elly Erawati, Herlien Budiono (2010) Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian, Jakarta: Gramedia
- Habib Adjie (2008) Hukum Notaris di Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No: 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris), Bandung: PT. Refika Aditama, hlm.40
- Habib Adjie (2014) Hukum Notaris Indonesia, Bandung: Refika Aditama, hal. 25.
- Habib Adjie(2008) Pembuktian Sebagai Ahli Waris Dengan Akta Notaris (Dalam Bentuk Akta Keterangan Ahli Waris), Bandung: Mandar Maju
- Habib Adjie (2008) Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, Bandung: PT. Refika Aditama, 77
- Harsono, Boedi. (2008). Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Jakarta: Djambatan.
- Harahap, M. Yahya (1986) Segi-Segi Hukum Perjanjian, Bandung: Alumni

Husein Umar (2011) Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis, Jakarta:

Rajawali Press 86

Kholidah, dkk (2023) Notaris Dan PPAT Di Indonesia Aplikasi Teori Dan Praktik

Dalam Perbuatan Akta, Yogyakarta: Semesta Aksara

Moh. Nazir, (2009) Metode Penelitian, Bogor: Ghalia Indonesia, 54. 56

R Soegondo Notodisoerjo (1993) Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan,

Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 13

Ruslan, Rosady (2003) Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi,

Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm 24

Salim HS (2015) Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta), Jakarta:Raja Grafindo Persada Mataram,hlm 33.

Salim, HS (2016) Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah, Jakarta:Raja Grafindo Persada, hlm. 85

Sukmadinata, Nana Syaodih (2009) Metode Penelitian Pendidikan, Bandung:

Remaja Rosdakarya, hlm 6

Zainuddin Ali (2009) Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika

## **ARTIKEL DARI JURNAL**

Addien Iftitah. (2014). *Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Membuat Akta Jual Beli Tanah beserta Akibat Hukumnya*, Lex Privatum, 2(3), hal 49.

- Adynyani, N.K.S. (2013). *Tinjauan Yuridis Sahnya Jual Beli Hak Milik Atas Tanah Menurut Hukum Adat dan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Di Kabupaten Karangasem*. Jurnal Media Komunikasi FIS, 12(1), 88.
- Dantes, K.F, Hadi, I.G.A.A. (2021). *Kekuatan Hukum Akta Jual Beli Yang Dibuat Oleh Camat Dalam Kedudukannya Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Peraturan Jabatan PPAT*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 9(3), 908
- Dantes, K.F, Hadi, I.G.A.A. (2021). *Dasar Hukum Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Buleleng*. Jurnal Komunikasi Hukum, 7(1), 491
- Dantes, K.F, Hadi, I.G.A.A.(2025). *Akta Autentik Perjanjian Kawin Berdasarkan Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015:Proses dan Pertanggungjawaban Notaris Di Kabupaten Tabanan*. Jurnal Hukum Kenotariatan, 10(02), 246
- Dantes, Komang Febrinayanti. (2022). *Pengaturan Sistem Elektronik Dalam Pengambilan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas Yang Berkepastian*. Jurnal Komunikasi Hukum, 8(1), 531-532
- Dewi Kurnia Putri dan Amin Purnawan. (2017). *Perbedaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas Dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tidak Lunas*, Jurnal Akta, UNISSULA, 4(4), 625.

- Hadi, I.G.A.A, Dantes, K.F. (2021). *Penyelesaian Sengketa Kontrak Antara Pemerintah Kabupaten Buleleng Dengan PT. Chandra Dwipa Terkait Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Taman Bung Karno Singaraja.* Jurnal Komunikasi Hukum, 7(1), 272-275
- Hadi, I.G.A.A, Dantes, K.F, Windari, R.A, Parwati, N.P.E, Lestari, Nastiti. (2025). *Akta Autentik Perjanjian Kawin Berdasarkan Putusan MK No.69/PUU-XIII /2015:Proses dan Pertanggungjawaban Notaris di Kabupaten Tabanan*, 10(02), 246
- Irham Akbar, Hasim Purba & Suprayitno. (2025) *Kedudukan Notaris /PPAT yang Dikenai TPPU dan Pemalsuan Akta, Terkait, and Yang Dibuatnya*. 2025. “E-ISSN: 2962-9675.” 4(1): 24–49.
- I Putu Edi Rusmana. (2025). *Menyingkap Cela Hukum: Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Penyalahgunaan Akta Elektronik*. Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan 10(10): 8.
- Sudharma, dkk (2020) *Clustering Data Remunerasi PNS Menggunakan Metode K-Means Clustering Dan Local Outlier Factor*. Majalah Ilmiah Teknologi Elektro, 19(1), 33.
- Tardjono, Heriyono. (2021). “*Urgensi Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia*.” Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan 2(2): 51
- Valerio Xaverius Tjipto (2020). *Keabsahan Akta PPAT Yang Tidak Ditandatangi Para Saksi* (Studi Putusan PN. No.16/Pdt.G/2015/Pn.Krg). Jurnal Hukum, UNJA

Wiharjo. (2022). *Akibat Hukum Akta Jual Beli Tanah Yang Dibuat oleh PPAT Dengan Identitas Diri Palsu Penghadap*” Notary Law Research,4(02), 57

## **SKRIPSI**

E.A Muftiha. (2010). Tesis. *Otentisitas akta serta tanggung jawab notaris yang melakukan kelalaian dalam menjalankan jabatan (Studi kasus Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris: 03/B/Mj.PPN/2007)*

Ihlan R.(2023). Skripsi. *Kewenangan PPAT Dalam Pembuatan akta Jual Beli*

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor 7)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Berserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42)

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Atas Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Perubahan Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (selanjutnya disebut Perkaban)

Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

#### **MAJALAH RENVOI**

Boedi Harsono. (2007, Januari, 3). PPAT Sejarah Tugas dan Kewenangannya.

Renvoi (No. 8.44.IV), hlm 11.

Herlien Budiono, (2016. November, 3). Perwakilan, Kuasa dan Pemberian Kuasa.

Renvoi, No (6.42.IV), hlm 68.

